



Aset Pemkab Melawi

Rp 1,471 Triliun

NANGA PINOH. Melawi merupakan kabupaten baru di Kalbar, namun aset daerah yang tercatat baru Rp 1,471 triliun. Nilai ini dipastikan akan terus bertambah, lantaran banyak aset daerah milik Kota Juang yang belum didata. Begitu paparan Kepala Bidang Aset, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Syaripuddin. Dikatakannya, aset tersebut dalam berbagai bentuk, mulai dari tanah, bangunan, sampai buku dan barang seni. Lebih rinci, ungkap Syaripuddin, jalan,

jembatan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 671 miliar, buku, barang seni, hewan dan tumbuhan sebesar Rp 16 miliar. Lalu tanah nilai asetnya mencapai Rp 108 miliar, peralatan dan mesin Rp 176 miliar, gedung dan bangunan Rp 398 miliar. "Serta konstruksi yang masih dalam tahap pengerjaan sebesar Rp 101 miliar," ungkap Syaripuddin juga mengungkapkan, nilai aset tersebut masih bisa bertambah, karena ada beberapa aset yang belum bersertifikat, sehingga baru tercatat di DPPKAD.

Aset penyerahan dari Kabupaten Sintang seperti tanah dan bangunan terdapat 543 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, baru 27 bidang yang sudah bersertifikat dan satu SKT. "Ada juga tanah yang masih proses di BKN sebanyak 42 sertifikat. Aset ini saja bernilai sekitar Rp 32 miliar. Untuk aset yang belum dinilai hanya tercatat sebagai aset nol dan satu," jelasnya. Temuan BPK tahun 2010 mengungkapkan, aset yang belum dinilai oleh Pemkab bisa mencapai Rp 51 miliar. Hanya terang

Syaripuddin, jumlah tersebut justru bisa lebih besar mengingat masih banyaknya aset yang belum bersertifikat, dan aset yang akan bertambah karena dilakukan kapitalisasi. "Banyak aset kita yang tercatat masih dalam tahap pengerjaan, termasuk Kantor Bupati, serta rumah dinas untuk Sekda dan Wakil Ketua DPRD, serta Workshop PU. Selain itu, aset penyerahan dari Sintang, jika sudah dilakukan penilaian, nantinya tentu akan menambah nilai total aset yang dimiliki oleh Pemkab Melawi," tuturnya.

Aset penyerahan dari Kabupaten Sintang, kata Syaripuddin saat ini masih dilakukan pendataan untuk penilaian. Menurutnya, penilaian nilai aset dilakukan oleh pihak ketiga. Bidang Aset kata Syaripuddin akan melakukan kapitalisasi, yaitu mendata aset yang bernilai di atas Rp 500 ribu. "Selain itu juga kita akan menghitung nilai penyusutan aset kita karena selama ini hal tersebut belum kita lakukan. Perhitungan ini tentunya menunggu Peraturan Bupati," pungkasnya. (aji)